

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi yang semakin kompleks ini, gagasan tentang pembangunan berkelanjutan telah menjadi perhatian utama di berbagai bidang, seperti industri bisnis dan investasi. Sulistyono & Fatmawati (2022) *Sustainable Development* adalah konsep pembangunan holistik yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. *Sustainable development* kini dipahami sebagai integritas tiga pilar utama yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Pilar ekonomi berfokus pada pertumbuhan yang stabil dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Pilar sosial menekankan pada keadilan, inklusivitas, dan peningkatan kualitas hidup manusia. Sementara itu, pilar lingkungan berkaitan dengan perlindungan ekosistem, konservasi biodiversitas, dan mitigasi perubahan iklim.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah melakukan banyak hal di dunia untuk menentukan rencana pembangunan berkelanjutan. PBB meluncurkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SD) pada tahun 2015, yang terdiri dari 17 tujuan terpisah. SD mencakup berbagai hal, seperti pengentasan kemiskinan dan kelaparan, kualitas pendidikan yang lebih baik, kesetaraan gender, aksi iklim, dan kolaborasi global.

Implementasi *sustainable development* menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah menyeimbangkan kebutuhan pembangunan jangka pendek dengan keberlanjutan jangka panjang. Negara-negara berkembang

seringkali menghadapi dilema antara mendorong pertumbuhan ekonomi cepat atau melindungi lingkungan.

Di sisi lain, negara-negara maju dituntut untuk mengubah pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan. Ini sejalan dengan gagasan *triple bottom line*, yang menempatkan orang, bumi, dan keuntungan sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan berkelanjutan adalah masalah penting bagi perusahaan di Indonesia, terutama perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII).

Widiastuti, Utami, & Handoko, (2018) menemukan bahwa tingkat pengungkapan informasi lingkungan sangat penting untuk mendorong praktik pembangunan berkelanjutan di perusahaan.

Empat komponen penting yang saling berhubungan diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Pertama dan terpenting, tata kelola lingkungan yang efektif diperlukan untuk menjamin pengelolaan yang berkelanjutan dari sumber daya alam dan ekosistem. Kedua, sebuah sistem yang tidak merusak lingkungan mendorong pertumbuhan inklusif, efisiensi sumber daya, dan inovasi yang menguntungkan alam. Ketiga, keberlanjutan lingkungan. Perlindungan dan restorasi ekosistem, mitigasi perubahan iklim, dan penggunaan sumber daya alam yang bijak dan terukur. Dan terakhir adalah inklusi sosial, kesempatan yang sama untuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesempatan.

Ekonomi yang berkelanjutan harus memenuhi kebutuhan semua orang dalam batas-batas planet (Raworth, 2017). Konsep ini menawarkan model visual dan kerangka kerja untuk memahami pembangunan berkelanjutan yang

menggabungkan kebutuhan sosial dengan batas-batas ekologis planet. Model ini telah mendapatkan perhatian dari pembuat kebijakan di berbagai tindakan.

Environmental Information Disclosure (EID) atau pengungkapan informasi lingkungan telah menjadi fokus penting dalam dunia bisnis dan investasi, terutama dalam konteks pembangunan berkelanjutan. *Environmental disclosure* merupakan pengungkapan informasi mengenai aktivitas lingkungan hidup suatu perusahaan, termasuk dampak operasional bisnis suatu perusahaan terhadap lingkungan fisik atau alam (Clarkson, Li, Richardson, & Vasvari, 2008). Clarkson menekankan bahwa EID tidak hanya tentang menyajikan data, tetapi juga tentang bagaimana perusahaan mengelola dampak lingkungannya.

Skor EID yang tinggi biasanya mencakup informasi kuantitatif dan spesifik, bukan hanya pernyataan umum tentang komitmen lingkungan (Cho & Patten, 2007).

Nilai-nilai EID harus mencakup informasi tentang emisi gas, rumah kaca, konsumsi energy, pengelolaan limbah, dan upaya perlindungan lingkungan (Patten, 2002). Mengembangkan indeks EID yang lebih komprehensif yang mencakup tujuh kategori:

Struktur tata kelola dan sistem manajemen, keterpercayaan, indikator kinerja lingkungan, pengeluaran lingkungan, strategi visi dan aspirasi, profil lingkungan, dan komitmen lingkungan (Clarkson et al., 2008). Menekankan pentingnya kualitas dan kuantitas EID bahwa tingkat tinggi harus mencakup informasi yang relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan (Rupley, Brown, & Marshall, 2012). Pengungkapan lingkungan dalam konteks islam harus

mencerminkan prinsip-prinsip syari'ah, termasuk konsep khalifa (kontrol), dan ADL (keadilan) (Haniffa & Cooke, 2002).

Perusahaan syari'ah perlu lebih banyak melakukan pengungkapan mengenai dampak lingkungannya sebagai bagian dari akuntabilitasnya kepada Allah dan masyarakat (Willett, 2003). Memahami tingkat pengungkapan lingkungan merupakan dasar penting untuk menilai bagaimana perusahaan yang terdaftar di JII mengkomunikasikan kinerja lingkungan mereka dan bagaimana hal ini berdampak pada pembangunan berkelanjutan.

Tata kelola perusahaan menjadi semakin penting dalam dunia akademis dan bisnis, terutama dalam hal pembangunan berkelanjutan. Prinsip tauhid membentuk tata kelola perusahaan dari perspektif islam, yang menekankan keselarasan antara semua aspek kehidupan termasuk bisnis (Alam ChoVudhury & Ziaul Hoque, 2006).

Konsep CG dalam islam, mencakup dimensi spiritual dan etika yang melampaui pemahaman konvensional. Konsep-konsep seperti “amanah” (kepercayaan), “adil” (keadilan), dan “shura” (konsultasi), yang semuanya membentuk dasar untuk praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, perlu ada manajemen perusahaan yang baik. Manajemen ini memastikan bahwa kepentingan semua pemangku kepentingan dipertimbangkan dan bahwa perusahaan beroperasi dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan (Guler Aras & Crowther, 2008).

Hubungan yang erat antara CG dan keberlanjutan. Ini semakin penting dalam menghadapi masalah global seperti perubahan iklim. Mencerminkan

pergeseran perspektif CG dari fokus sempit pada kepentingan pemegang saham ke perspektif yang lebih luas yang mencakup tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini sejalan konsep “*Triple bottom line*” yang menekankan pentingnya kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Memeriksa *corporate governance* di negara berkembang menemukan bahwa : Tantangan tata kelola perusahaan di negara berkembang sering berbeda dari yang ada di negara maju, dengan masalah seperti struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, lemahnya perlindungan investor, dan lingkungan kelembagaan yang kurang berkembang menjadi lebih menonjol (Claessens & Yurtoglu, 2013).

Penelitian ini menekankan pentingnya memahami konteks lokal dalam menerapkan prinsip-prinsip CG. Di negara berkembang, termasuk Indonesia, tantangan tambahan mungkin termasuk : a) Dominasi perusahaan keluarga atau negara, b) Pasar modal yang kurang berkembang, c) Penegakan hukum yang lemah, d) Korupsi dan nepotisme, e) Keterbatasan dalam keahlian dan sumber daya untuk menerapkan praktik CG yang baik.

Perusahaan dapat menjadi lebih bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan mereka dengan mengungkapkan informasi tentang lingkungan mereka, yang dapat mendorong praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Hasil menunjukkan bahwa organisasi harus bertanggung jawab kepada semua pihak yang terkena dampak operasinya, termasuk pemegang sahamnya.

Terdapat penelitian sebelumnya mengenai EID terhadap *Sustainable Development* yang dilakukan oleh (Cormier, Magnan, & Van Velthoven, 2005), menemukan bahwa ada korelasi positif antara tingkat pengungkapan lingkungan

dan tingkat transparansi informasi perusahaan secara keseluruhan. Hubungan *Corporate Governance* terhadap *Sustainable Development* sangat kompleks dan saling melengkapi.

Tata kelola perusahaan yang baik dianggap sebagai fondasi penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Keberlanjutan lebih sering dimasukkan ke dalam strategi bisnis perusahaan dengan tata kelola yang kuat (Ijomah, Nwabekee, Agu, & Abdul-Azeez, 2024). Mereka menemukan bahwa organisasi yang memiliki sistem tata kelola yang efektif lebih mampu menangani masalah lingkungan sosial jangka panjang, yang merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya pada penelitian mengenai *corporate governance* terhadap *sustainable development* oleh (Güler Aras, Crowther, & Capaldi, 2008) terdapat korelasi positif antara tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko lingkungan dan sosial yang lebih baik.

Semakin baik tata kelola perusahaan, semakin baik kemampuan organisasi untuk menemukan, menilai, dan mengelola risiko lingkungan dan sosial, yang berkontribusi pada keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Tetapi, bisa mendapatkan hasil negatif bahwa jika manajemen perusahaan terlalu berfokus pada menghasilkan keuntungan jangka pendek, mereka dapat menghindari investasi jangka panjang yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan (Lazonick & O'sullivan, 2000). Mereka berpendapat bahwa tekanan untuk memenuhi ekspektasi laba kuartalan dapat mendorong perusahaan untuk

mengurangi investasi dalam R&D, pelatihan karyawan, dan inisiatif lingkungan yang sangat penting untuk keberlanjutan jangka panjang.

Penghargaan tahunan pelaporan keberlanjutan yang diberikan oleh *National Center For Sustainability Reporting* (NCSR) adalah salah satu alasan mengapa pelaporan keberlanjutan menjadi tren di Indonesia. Untuk memberikan pertanggungjawaban kepada *stakeholder*, perusahaan harus memiliki laporan akuntabilitas yang jelas dan praktik tata kelola yang baik (Tarigan & Samuel, 2014).

Nurfitriana (2020) dengan mengeluarkan laporan ketahanan perusahaan, perusahaan dapat memberitahu pemangku kepentingan tentang kegiatan perusahaan, dampak yang ditimbulkannya, dan tindakan strategisnya.

Dalam NCSR perusahaan yang disebutkan dalam laporan ketahanan diharapkan dapat mendukung pencapaian program tujuan pembangunan berkelanjutan (SD) untuk menyelesaikan masalah lingkungan, ekonomi, sosial di seluruh dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang mendukung program tersebut, dan ada lebih dari 700 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan banyaknya perusahaan yang kegiatan bisnisnya akan dievaluasi.

Berdasarkan data (ASEAN, 2020) jumlah perusahaan yang sudah menerapkan laporan berkelanjutan adalah 59,2%. Negara-negara di wilayah ASEAN, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand masing-masing memiliki tingkat pengungkapan laporan berkelanjutan sebesar 53,6%, 56,3%,

64,5%, 61,7%, dan 60%. Indonesia adalah negara dengan persentase paling rendah di wilayah ASEAN.

Fenomena rendahnya tingkat pengungkapan *sustainable development* di Indonesia menjadi perhatian penting, mengingat banyaknya perusahaan yang terdaftar di BEI dengan berbagai kegiatan bisnis yang berpotensi berdampak pada lingkungan dan sosial. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam mengungkapkan informasi keberlanjutan, serta sejauh mana komitmen perusahaan-perusahaan Indonesia terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Berdasarkan paparan diatas dan juga didukung dengan hasil penelitian terdahulu terkait variabel yang mempengaruhi *Sustainable development*, maka peneliti mengambil judul penelitian “**Pengaruh Tingkat *Environmental Information Disclosure* dan *Corporate Governance* Terhadap *Sustainable Development* Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta *Islamic Index* Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh tingkat *Environmental Information Disclosure* berdampak terhadap *Sustainable Development* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta *Islamic Index* Indonesia?

2. Bagaimana pengaruh tingkat *Corporate Governance* terhadap *Sustainable Development* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta *Islamic Index* Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat *Environmental Information Disclosure* terhadap *Sustainable Development* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta *Islamic Index* Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat *Corporate Governance* terhadap *Sustainable Development* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta *Islamic Index* Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah ini. Selain itu, mereka akan menambah literature yang sudah ada, dan meningkatkan pengetahuan tentang perkembangan studi akuntansi.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan informasi pentingnya praktik tata kelola yang baik dan pengungkapan informasi lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Memberi informasi kepada bisnis dalam membuat rencana pengungkapan informasi lingkungan yang lebih efisien. Ini juga menawarkan pengetahuan tentang bagaimana praktik tata kelola dapat disesuaikan dengan tujuan keberlanjutan.
- b. Bagi Investor, Penelitian ini dapat memberikan peningkatan pemahaman tentang bagaimana elemen non-finansial seperti tata kelola dan pengungkapan lingkungan dapat mempengaruhi keberlanjutan perusahaan dengan memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan investasi, terutama bagi investor yang mempertimbangkan komponen ESG.
- c. Bagi peneliti, Penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan di pasar modal syariah dan pengungkapan informasi lingkungan. Membantu dalam menilai keberhasilan peraturan yang ada terkait ESG di pasar modal syariah.